

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
PERJANJIAN KREDIT DALAM *FORCE
MAJUERE* DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS KANTOR BAITUL MAAL WA
TAMWIL AMANAH BAROKAH SLAWI)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

PRAYOGA ALDIO DE LA SANDA

NPM. 51175000141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN KREDIT
DALAM *FORCE MAJUERE* DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI KANTOR BAITUL MAAL WA TAMWIL
AMANAH BAROKAH SLAWI)**

PRAYOGA ALDIO DE LA SANDA

NPM. 5117500141

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 05 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.

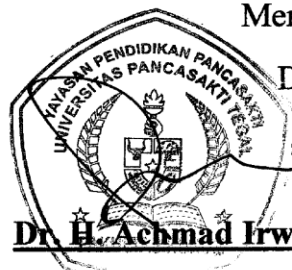
NIDN 0621076101


H. Toni Haryadi, S.H., M.H.

NIDN 0020045801

Mengetahui,

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H., M.H.

NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN KREDIT
DALAM *FORCE MAJUERE* DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI KANTOR BAITUL MAAL WA TAMWIL
AMANAH BAROKAH SLAWI)**

PRAYOGA ALDIO DE LA SANDA

NPM. 5117500141

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh

Tegal, 05 Agustus 2021

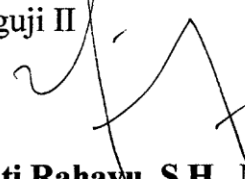
Penguji I



Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.

NIDN 0605037501

Penguji II



Kanti Rahayu, S.H., M.H.

NIDN 0617075701

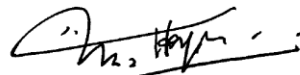
Pembimbing I



Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.

NIDN 0621076101

Pembimbing II



H. Toni Haryadi, S.H., M.H.

NIDN 0020045801



Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H., M.H.

NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prayoga Aldio De La Sanda
NPM : 5117500141
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 03 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penerapan Perjanjian Kredit Dalam *Force Majeure* Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kantor Baitul Maal Wa Tamwil Amanah Barokah Slawi)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 05 Agustus 2021

Yang menyatakan

Prayoga Aldio De La Sanda



ABSTRAK

Kedudukan dalam suatu hukum perjanjian yang berlaku dalam perkreditan yang mana untuk membela pada debitur dengan keadaan yang diluar dugaan contohnya pada kondisi pandemi covid-19. Istilah *Force Majuere* juga berlaku dalam akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Mikro yang berkerja dalam prinsip syariah.

Jenis penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis dalam penerapan *force Majuere* dalam masa kondisi pandemi Covid-19. (2) Untuk mengetahui penerapan *force majeure* terhadap perjanjian kredit di kantor BMT Slawi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Libarary Research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi pustaka dan penelitian lapangan berupa wawancara pengumpulan data klausul *Force Majuere* dalam Kantor BMT Amanah Barokah Slawi.

Hasil penilitian ini menunjukan kedudukan *Force Majuere* dalam akad *murabahah* yang terjadi dalam kondisi pandemi Covid-19 dan diimplementasikan pada lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah. Kedudukan *force majeure* dalam suatu kegiatan akad *murabahah* sebagai suatu keharusan karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki dan membahayakan yang berada di luar kuasa dari para pihak dalam akad *murabahah*. Istilah *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPperdata (BW) dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Dan sebagai obyek penelitian adalah Kantor BMT Amanah Barokah Slawi berbadan hukum koperasi diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM). Secara kelembagaan, badan hukum BMT dapat berbentuk koperasi, yayasan, perseroan terbatas (PT), dan bahkan kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : *Force Majuere*, Akad *Murabahah*, Penerapan Kantor BMT.

ABSTRACT

Position in a legal agreement that applies in credit which is to defend debtors with unexpected circumstances, for example in the Covid-19 pandemic. The term Force Majeure also applies to murabahah contracts at Microfinance Institutions that work under syariah principles.

This type of research aims: (1) To describe the juridical review in the application of force majeure during the Covid-19 pandemic. (2) To find out the application of force majeure to the credit agreement at the BMT Slawi office.

This type of research is library research, namely research that uses secondary data and the source of the data can be obtained through document searches. The approach used is juridical empirical. The method used to collect data is library research and field research in the form of interviews for collecting data on the Force Majeure clause in the BMT Amanah Barokah Slawi Office.

The results of this study show the position of Force Majeure in murabahah contracts that occurred in the Covid-19 pandemic and were implemented in microfinance institutions with sharia principles. The position of force majeure in a murabahah contract activity is a must because it anticipates unwanted and dangerous things that are beyond the control of the parties in the murabahah contract. The term Force majeure is one of the concepts in civil law in Article 1244 and Article 1245 of the Civil Code (BW) and is accepted as a principle in law. And as the object of research is the Office of BMT Amanah Barokah Slawi as a cooperative legal entity which is specifically regulated in Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (UULKM). Institutionally, BMT legal entities can take the form of cooperatives, foundations, limited liability companies (PT), and even non-governmental organizations (KSM).

Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Force Majeure, Murabahah Contract, Implementation of BMT Office.

MOTTO

“Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin

Bahkan buah kelapa yang tumbuh di pohonnya dia memiliki air”-Prayoga Aldio Ds

Percayalah bahwa setiap masalah yang diberi oleh allah pasti ada jalannya, sebab

Allah menciptakan hambanya sesuai dengan kekuatan hambanya ketika di coba.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim..Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dari lubuk hati yang terdalam, atas kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini menuju satu step pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya untuk mencapai cita-cita saya. Atas kehendak-Nya pula saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu dan beriman. Dengan ini saya persembahkan dan ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang membantu melancarkan saya dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini, untuk:

- ♣ Bapak Mufti dan Ibu Yiyin Yuliani, kedua orangtua yang telah memberikan segala kasih sayang dan cintanya untuk aku. Dan selalu memberikan semangat dan doa yang tidak pernah berhenti buat anak-anaknya. Terimakasih Pah, Bu.
- ♣ Saudari-saudariku tersayang. Dek Nuke Syafira Salsabila dan Dek Ni via Qurine, yang selalu men-*support* aku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelawakan mereka yang penuh canda tawa dan kasih. Makasih ya Dek, juga saudara/i-ku yang lainnya.
- ♣ Untuk orang yang spesial, si *support system* tapi juga menyebalkan, Dinda Aviany. Terima kasih buat *up n down*-nya selama kita kuliah dan sewaktu kita nyelesein tugas akhir skripsi ini. Bener-bener gak bisa dilupain gimana perjuangan kita. Doa terbaik buat kita kedepannya yaa, aamiin.
- ♣ Untuk Teman-teman tertawa aku terutama buat Yusuf, Bagas, Ivan makasih ya bro udah mau belajar dan ngopi bersama kalian terbaik. Dan daftar bareng akhirnya lulus juga bareng.
- ♣ Untuk keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM Futsal), Pelatih, Pembina yang selalu mengisi hari ketika pusing mengerjakan skripsi aku, terimakasih atas pengalaman temen-temen semua bangga membawa prestasi bergengsi dan bisa juara.
- ♣ Untuk Keluarga Djokam FC, *Official, Manager*, Pelatih, dan Tim Medis kalian membantu aku dilapangan dan diluar lapangan. Terutama pada Yoga Hernanda Yusuf dan Umam Khalif yang selalu membantu motivasi dalam pembuatan skripsi aku. Tetep Ngaji Iyo Bal-balan Iyo.
- ♣ Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang lainnya, terima kasih sudah saling berbagi ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan asalam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat untuk kita semua.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Hukum, Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
3. Wakil Dekan I, Kanti Rahayu S.H., M.H.
4. Wakil Dekan II, Toni Haryadi, S.H., M.H.
5. Wakil Dekan III, Imam Asmarudin, S.H., M.H.
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Tyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.
7. Dosen Pembimbing I Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II H. Toni Haryadi, S.H., M.H.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt., sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal, khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 05 Agustus 2021

Prayoga Aldio De La Sanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL.....	15
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	15
B. Tinjauan tentang Force Majeure	16

1. Pengertian Force Majeure menurut Para Ahli.....	16
2. Kedudukan Force Majeure dalam Hukum Perdata	18
3. Kedudukan Force Majeure dalam Hukum Islam	21
C. Tinjauan tentang Baitul Maal Wa Tamwil	27
1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	27
2. Kedudukan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Peraturan Perundang-Undangan	35
D. Tinjauan umum tentang Covid-19	42
1. Pengertian tentang Covid-19 dalam World Health Organization (WHO)	42
2. Tinjauan awal masuknya Virus Covid-19 di Indonesia	44
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penerapan <i>Force Majeure</i> dalam Masa Pandemi Covid-19	46
1. Kedudukan <i>Force Majeure</i> dalam Akad Murabahah.....	46
2. Kedudukan <i>Force Majeure</i> dalam Akad Perdata.....	51
B. Penerapan <i>Force Majeure</i> terhadap Perjanjian Kredit di Kantor BMT Amanah Barokah Slawi.....	55
BAB IV. PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Penutup	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. LKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Di Indonesia, LKM diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit motive*) saja, tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (*social motive*) yang kegiatannya lebih bersifat *community development*. Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang

diperjanjikan menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah.¹

Dengan berjalannya perkembangan industri lembaga keuangan syariah muncul lembaga-lembaga keuangan yang bersifat mikro yang mana masih belum digarap oleh perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat sebagaimana lembaga baru bernama Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ketiga lembaga perbankan tersebut diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mana menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang artinya sistem kerja menurut islami.² Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro dibentuk untuk izin pada LKM yang ada. Mengenai peraturan yang ada dalam kasus investasi ilegal yang dilakukan BMT yang tak berizin, OJK juga mengambil peran untuk perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, OJK mengambil langkah melalui (Satgas Waspada Investasi) di bentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹Abdul Rasyid, *Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>, Diakses pada 17 Febuari 2021.

² Achi Hartoyo, *BWM, BMT, dan BPRS, Apa Bedanya?*, <https://www.sharianews.com/posts/bwm-bmt-dan-bprs-apa-bedanya>, Diakses 16 Febuari 2021.

01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016.³ Hal tersebut juga berlaku dalam analisis pembiayaan syariah termasuk dalam akad murabahah, agar resiko kerugian dan tidak dilunasinya kredit dapat ditekan. Murabahah adalah jual beli barang pada harga dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Akad yang banyak mendapat penilaian tentang kehalalan pelaksanaannya adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati. Dalam hal ini, murabahah dapat dilakukan dengan skema hutang oleh Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan jaminan atasnya.⁴

Dalam Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT yang berbadan hukum pada koperasi untuk menjalankan simpan pinjam kepada masyarakat yang khususnya berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, jauh dari kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian, pelanggaran bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan benar secara syariah. Menjalankan sistem kerja dari BMT yaitu simpan pinjam hal ini tak jauh dari kredit yang mana dapat memudahkan bagi para debitur yang ingin membeli suatu barang secara kredit yang diperantarai oleh Lembaga Keuangan. Istilah ini menyambung dengan adanya sistem kontrak suatu utang piutang. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Peristiwa

³ Satgas Waspada Investasi, “*OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi*”, <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi>, Diakses 17 Februari 2021.

⁴ Melihat Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia(MUI),tentang *Murabahah poin keempat dan kelima*,Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/Vol.IV/2000.

tersebut mengakibatkan suatu hubungan hukum antara para pihak, yang di dalamnya mencakup adanya hak dan kewajiban. Dalam suatu kontrak kreditur dalam perbankan syariah biasanya berisi mengenai pengaturan perbankan syariah atau yang lebih disebut dengan istilah *force majeure (overmacht)*. Pengaturan atas *force majeure* ini ada karena untuk melindungi debitur manakala dalam menjalankan kewajibannya kepada kreditur terjadi suatu kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat berupa gempa bumi, kebakaran, banjir, tanah longsor, perang, kudeta militer, embargo, epidemik, dan lain sebagainya.⁵

Untuk saat ini perekonomian semua negara menurun karena adanya wabah virus Covid-19 yang melanda hampir penjuru dunia, dampak dari virus Covid-19 juga dirasakan semua pada masyarakat negara tersebut. Terutama pada masyarakat Indonesia yang sedang menjalani kredit disuatu BMT atau lembaga pembiayaan. Dalam Lembaga Keuangan Mikro salah satunya yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) bekerja dengan dasar prinsip-prinsip syariah yang harus memiliki izin dari OJK jika tidak memiliki izin maka BMT tersebut dinyatakan ilegal. BMT diatur secara spesifik pada peraturan Perundang-undangan indonesia, yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM). BMT sendiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada awalnya BMT didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan

⁵Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol.IV/No 2/Feb/2016.

kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan, badan hukum BMT dapat berbentuk koperasi, yayasan, perseroan terbatas (PT), dan bahkan kelompok swadaya masyarakat (KSM). Status hukum yang berbeda-beda ini menyebabkan BMT tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda sesuai dengan kelembagaan yang dipilih. BMT berbentuk koperasi tunduk pada peraturan terkait koperasi BMT berbentuk yayasan tunduk pada peraturan terkait yayasan BMT berbentuk PT tunduk pada peraturan terkait PT BMT berbentuk KSM tunduk pada UU Organisasi Masyarakat. Belakangan, dengan berlakunya UULKM, BMT berbentuk KSM tidak dimungkinkan lagi, karena badan hukum LKM harus berbentuk koperasi atau PT.⁶ Pembiayaan syariah (BMT) sebagai bagian dari ekonomi syariah, maka dalam pendekatan *force majeure* juga harus dari sisi Hukum Islam. *Force majeure* adalah suatu keadaan yang memaksa yang dialami seorang. Dalam hukum Islam *force majeure* dikenal dengan istilah dharurah, yang diartikan sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia. Dharurah berkaitan dengan lima tujuan yang dikenal dalam hukum Islam sebagai tujuan syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Sehingga seseorang yang mengalami keadaan tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang awalnya dilarang untuk mengatasi permasalahan

⁶ Jogloabang, “UU 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-2013-lembaga-keuangan-mikro>, Diakses 18 Februari 2021.

yang di hadapinya.⁷ Mahkamah Agung melalui putusannya No.409K/Sip/1983 telah memberi pernyataan bahwa keadaan yang memaksa dapat dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut memang tidak dapat dicegah oleh pihak yang berprestasi sekalipun.⁸ Bahkan jauh sebelum munculnya putusan seperti di atas, dalam putusan Mahkamah Agung No. 24K/Sip/1958 juga menyatakan bahwa *force majeure* sudah menutup adanya kemungkinan maupun alternatif lainnya untuk pihak yang terkena *force majeure* guna memenuhi kontrak. Pasal 91 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa kebakaran termasuk dalam kategori keadaan kahar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai penerapan *force majeure* dalam masa kondisi pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana penerapan *force majeure* terhadap perjanjian kredit di kantor BMT Amanah Barokah Slawi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis dalam penerapan *force Majeure* dalam masa kondisi pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui penerapan *force majeure* terhadap perjanjian kredit di kantor BMT Slawi.

⁷ Hary Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115

⁸ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 20 Febuari 2021.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang di ambil dari penelitian, oleh karena itu penulis mengharapkan agar bisa diterima baik dan berguna. Adapun manfaat diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan mengetahui segala sesuatu kewajiban yang berhubungan dengan lembaga perbankan debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan dimana dapat diterima tentang *force majeure* salah satu konsep dalam hukum perdata dan sebagai prinsip dalam hukum. Suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa skripsi yang memiliki inti dan judul kemiripan penelitian yang penulis buat. Namun demikian perlu diketahui bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang sekarang buat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang suatu perjanjian perkreditan dimasa pandemi Covid-19 antara kreditor dengan lembaga perbankan syariah yang mana kreditor tidak

sanggup mencapai prestasi dikarenakan suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Adanya peraturan yang mengatur *force majeure* diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Penelitian ini yang dimaksud diantaranya:

1. Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (force majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, jurnal *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor perjanjian yang mempengaruhi Keadaan Memaksa (*force majeure*) dan bagaimana implikasi pembatalan perjanjian yang disebabkan Keadaan Memaksa (*force majeure*), yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Keadaan memaksa *force majeure /overmach* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengutip dari sumber Darly John Rasuh, untuk memenuhi penelitian yang penulis buat karena jurnal tersebut memiliki isi yang jelas dan mudah dalam dipahami. Dari jurnal diatas penerbit meninjau dengan metode penelitian hukum normatif.

2. Umdah Aulia Rohmah, *Akad Dalam Keadaan Memaksa*, jurnal *Lex Reanis Ssance*, No. 1 Volume. 4 Januari 2019: 104 – 125. Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai keadaan memaksa bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan perestasiya. Kemudian dalam Pasal 41 dijelaskan mengenai syarat-syarat peristiwa yang termasuk keadaan memaksa yakni, peristiwa tersebut haruslah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, peristiwa tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhi prestasi, peristiwa terjadi di luar kesalahan si pihak yang harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi prestasi tersebut tidak beritikad buruk. Pada jurnal diatas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) penulis memahami tentang ekonomi Syariah yang dibahas pada Lembaga Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
3. Arie Exchell Prayogo Dewangker, *Penggunaan Klausula Force Majuere dalam Kondisi Pandemi*, Jurnal *Education And Development*, Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020. Kondisi pandemik COVID-19 berdampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berakibat pada penutupan operasional perusahaan hampir di seluruh Indonesia. Ditutupnya operasional perusahaan tersebut menyebabkan likuiditas perusahaan terganggu yang pada akhirnya timbul pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak terealisasikannya program-program rencana

kerja yang telah disusun. Apabila pandemik terus berlanjut, timbul kekhawatiran akan terjadinya kepailitan. Penulis juga meneliti jurnal pada dampak besarnya Covid-19 yang mana juga mengenai sektor pekerja pabrik dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

4. Asep Ganjar Sukarelawan, Retno Anisa Larasati, *Sistem Operasional Internal Bank Syariah*, Inal Kahfi, *Al-Mujadid: jurnal Ilmu-ilmu Agama* Vol.2 No.1, 60-70,2020. Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang sistem operasional internal bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang didapat dari buku dan jurnal internet. Hasil penelitian sistem penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Transaksi pada bank syariah ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. Jurnal diatas memiliki sifat normatif yang berhubungan pada nilai-nilai agama, dengan ini penulis dapat mengerti kaidah-kaidah ilmu Perbankan Syariah.
5. Solihin, S. *Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maalwat Tamwil) di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan

dan Teknologi , 19 (1) 2020, 131-142. *Penelitian ini untuk memahami dampak pandemi Covid-19 dan pengelolaan permodalan bagi keberlangsungan bisnis BMT. Untuk mendapatkan pendapatan yang semaksimal mungkin, kegiatan pembiayaan BMT juga menganut prinsip syariah, bisa dalam bentuk bagi hasil, keuntungan atau jasa manajemen. Penggunaan modal BMT yang ada pada saat pandemi Covid-19 saat ini adalah: Pertama, penggunaan produktif untuk pembiayaan anggota, masyarakat, dan BMT lainnya yang mengajukan pembiayaan untuk usaha di bidang ekonomi alat kesehatan, makanan dan ritel, demikianlah yang mereka lakukan tidak memiliki risiko yang dapat mengurangi aset BMT. Kedua, pemanfaatan yang tidak produktif yaitu dana pelatihan SDM, pada saat pandemi Covid-19 dibutuhkan SDM BMT yang mampu bekerja cerdas dan kreatif untuk meminimalisir risiko saat terjadi resesi ekonomi. Ketiga, penggunaan dana untuk memitigasi risiko seperti penyisihan pembiayaan bermasalah, dana cadangan umum tambahan, dan penyisihan laba ditahan. Selama pandemi Covid-19, sebagian besar UMKM yang menjadi nasabah atau anggota BMT mengalami penurunan omset yang mengakibatkan kredit macet (peningkatan NPF di lembaga keuangan syariah), sehingga untuk mengantisipasi risiko gagal. Dengan ini penulis lebih jelas lagi dalam meneliti tentang bagaimana penerapan force majeure dalam masa pandemi Covid-19 di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan melihat jurnal ini yang membahas mengenai bagaimana pengelolaan modal*

dalam kegiatan pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang menganut prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Libarary Research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam meneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu meninjau permasalahan hukum sebagai realitas sosial maupun realitas kultural.¹⁰

3. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini objeknya adalah kantor BMT Amanah Barokah Slawi.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu:
 1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM) .
 2. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku, jurnal hukum, artikel dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas terkait dengan perjanjian, koperasi, lembaga keuangan syariah.

⁹amirudin dan zainal asyikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: rajawali Pers, 2010, hlm. 118.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 1986, hlm.32

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus, maupun juga bahan yang diperoleh dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan penelitian lapangan berupa wawancara dan pengumpulan data klausul *Force Majuere* dalam Kantor BMT Amanah Barokah Slawi.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah akan digambarkan secara deskriptif-kualitatif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, kemudian dilakukan sinkronisasi dan dianalisis dengan peraturan atau literatur terkait.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik beratnya yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Dalam bab ini diuraikan teori-teori dan konsep yang tepat dan yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, antara lain: pengertian tinjauan yuridis, tinjauan tentang *Force Majeure*, tinjauan tentang Baitul Maal Wa Tamwil dan tinjauan umum tentang Covid-19.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *Force Majeure* dalam masa kondisi pandemi Covid-19 dan penerapan *Force Majeure* terhadap perjanjian kredit di Kantor BMT Amanah Barokah Slawi.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJUAN KONSEPTUAL

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹²

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹³ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹⁴ Yuridis merupakan pertimbangan atau

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 1470.

¹² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Reality Publisher*, Surabaya: Graha, 2009, hlm 651.

¹³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005, hal.10.

¹⁴ Sovia Hasanah, S.H, *Arti Landasan Filosofis ,Sosiologis, dan Yuridis*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan->

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Dalam penelitian secara yuridis penulis bermaksud untuk mencari komponen-komponen yang dikaji lebih dalam sehingga muncul nilai hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang berlaku. Dengan ini penulis memudahkan memecahkan suatu permasalahan pada *force majeure* dalam kondisi pandemi Covid-19 dalam lembaga pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan cara hukum yang berlaku.

B. Tinjauan tentang *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure* menurut para ahli

Keadaan memaksa atau *force majeure* banyak menuai perhatian khusus terutama di bidang perkreditan, hal ini debitur bisa beralasan dengan konkrit yang mana tidak mencapai suatu prestasinya di suatu lembaga pembiayaan. Begitu juga yang menuai perhatian khusus pada Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam yang berakibat ekonomi indonesia sangat turun. Maka dari itu semua para ahli membuka suara pada

pernyataan *force majeure* atau *overmatch*. Terdapat para ahli tentang *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi
2. Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
3. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.¹⁵
4. Subekti: Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang diduga itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat dilupakan, dan dimana ia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkara lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau hambatan dalam pelaksanaan itu, disebabkan karena kelalaiannya.
5. Sri Soedewi Masjchoen Sofwa yang menyitir dari Dr. HFA Vollmar: *overmacht* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak

¹⁵ P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 295.

mungkin memenuhi perutangan *absolute overmacht* atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar kemampuan manusia atau menimbulkan kerugaian yang sangat besar *relatif overmacht*.

6. Purwahid Patrik mengartikan overmacht atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan menghadapi keadaan memaksa yang tidak dapat diperparah keadaanya.¹⁶

Dengan adanya beberapa pendapat di atas maka seseorang tidak bisa semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan force majeure harus sesuai dengan unsureunsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata.

2. Kedudukan Force Majeure dalam Hukum Perdata

Kegiatan perkreditan, sebagai salah sektor penting bank untuk masyarakat, harus mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko, yang terkait dengan iktikad baik *willingness to pay* dan kemampuan

¹⁶ Rachmat SS Soemardipraja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat- syarat pengajuan perjanjian disebabkan keadaan paksa/Force Majeure*, <https://shallmanalfarizy.com/2020/05/pengertian-force-majeure-menurut-para-ahli/>, Diakses pada 16 Juni 2021.

membayar *ability to pay* nasabah untuk melunasi kreditnya.¹⁷ Dalam analisis kredit tersebut dikenal dengan Prinsip 5C, yaitu 1) *character* (watak, sifat, kebiasaan debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit, 2) *capacity* (kapasitas berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman, 3) *capital* (kreditur dapat menilai modal debitur, semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya), 4) *collateral* (jaminan yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya serta terakhir 5) *condition* (kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli, masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan sebagainya).¹⁸ *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata (BW) dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata (BW), bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dalam hal ini perikatan diartikan sebagai isi dari sebuah perjanjian yang memiliki sifat yang terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku

¹⁷ Ashofatul Lailiyah, “*Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Bank untuk Meminimalisir Resiko*”, Yuridika, Vol. 29 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 220.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 224

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338.¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.²⁰

Force majeure adalah salah satu istilah asing yang sering ditemukan dalam bidang hukum. *Force majeure* atau *overmacht* (Bahasa Belanda) sering diterjemahkan menjadi “keadaan kahar” atau “keadaan memaksa”. Keadaan memaksa ini juga dibagi jadi 2 jenis, yaitu absolut dan relatif.

- a. Keadaan memaksa absolut: keadaan di mana debitur sama sekali tidak bisa memenuhi prestasinya. Contohnya yaitu bencana alam yang terjadi sehingga menyebabkan objek perikatan musnah.
- b. Keadaan memaksa relatif: keadaan di mana debitur masih memungkinkan untuk melakukan prestasinya. Contohnya yaitu nelayan yang melakukan perjanjian kredit berjanji untuk membayar prestasinya setelah penjualan hasil tangkapan, namun tidak dapat langsung dilakukan karena cuaca dan gelombang laut yang memaksa nelayan tidak melaut. Namun masih memungkinkan kredit dibayarkan setelah nelayan melaut kembali. Beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* antara lain bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, perang,

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 78.

²⁰ Susanto, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Jakarta, Alfabeta, 2003, hlm. 142-143.

terorisme, kerusuhan, embargo, dan yang lainnya. Keadaan memaksa ini dapat terjadi di beberapa bidang hukum khususnya perjanjian, antara lain tentang perjanjian kredit, ketenagakerjaan, kontrak.²¹

Pada awal 2019 Indonesia terkena bencana non-alam yang bersifat Nasional yaitu Covid-19 virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina hampir seluruh Indonesia terkena dampak dari virus Covid-19. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai status bencana nasional dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 penetapan status bencana nasional ini memiliki dampak tersendiri bagi dunia usaha karena membuat pelaku usaha kesulitan bahkan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang terikat kontrak. Penetapan status bencana nasional ini bisa menjadi alasan kuat bagi setiap pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut yang disebabkan di luar prediksi dan tidak dapat dihindari.

3. Kedudukan Force Majeure dalam Hukum Islam

Dalam hukum perdata, kondisi ini disebut dengan istilah *force majeure* atau keadaan kahar. Sebelum hadirnya Keppres nomor 12 tahun 2020 pelaku usaha dapat menggunakan penyebaran Covid-19 sebagai alasan kahar atau *force majeure* saat tidak mampu memenuhi kewajiban perjanjian. Kuncinya adalah pihak dimaksud mampu memberikan alasan bahwa kegagalan memenuhi perjanjian bukan karena dirinya, melainkan

²¹Christian Josua F.X, *Mengenal Istilah "Force majeure"*, <https://www.kompasiana.com/christianjosua/5e7c6e5ad541df079d130974/mengenal-istilah-force-majeure>, Diakses 16 Juni 2021.

karena sesuatu yang tak dapat diprediksi dan tak dapat dihindari. Merujuk Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau *force majeure*. Kemudian Pasal 164 Ayat 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menambahkan pengusaha juga dapat melakukan PHK pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena kerugian atau bukan karena keadaan memaksa atau *force majeure* tetapi disebabkan efisiensi Masing-masing ketentuan PHK seperti tersebut mewajibkan pengusaha memberikan pesangon kepada pekerja/buruh seperti yang diatur Undang-undang tersebut. Meski terdapat dilindungi pada pasal tersebut PHK merupakan hal yang harus dihindari pelaku usaha yang merugikan pekerja/buruh dan bagi para pelaku usaha yang ada indonesia.²²

Dalam Hukum Islam, *force majeure* dapat dipersamakan dengan istilah *dharurah*. Dalam Hukum Islam *dharurah* diambil dari kata *darra*, *yadurru* dan *darran* yang memiliki arti merusak atau memberi *mudharat*. *Dharurah* adalah keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam Hukum Islam yang dikenal sebagai *maqasid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga

²²HukumOnline.com, Alasan Force Majeure yang Berimplikasi PHK Karyawan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e957e37d3ef0/alasan-force-majeur-yang-berimplikasi-phk-karyawan>, Diakses pada 16 Juni 2021.

memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *dharurah* tersebut.²³ Adapun penjelasan mengenai *maqasid al-syariah* dalam tingkatan *dharuriyat* sebagai berikut:²⁴

- a. Memelihara agama (*hifdzu din*), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Bila shalat ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara jiwa (*hifdzu nafs*), yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan pokok diabaikan maka akan terancam eksistensi jiwa manusia.
- c. Memelihara akal (*hifdzu aql*) yaitu diharamkannya minum-minuman keras, apabila ketentuan ini dilanggar maka akan terancam eksistensi akal manusia.
- d. Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), yaitu disyaratkannya menikah dan dilarang berzina. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan terancam eksistensi keturunannya.
- e. Menjaga harta (*hifdzu maal*), yaitu seperti disyariatkannya tatacara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan bathil seperti mencuri, riba dan lain-lain. Apabila dilanggar maka akan terancam eksistensi hartanya.

²³ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Stain Press, Ponorogo, 2010, hlm. 3

²⁴ Suhaeri, "Putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Jurnal Konsitusi*, Vol. 10 No. 2 Juni 2013, hlm. 365 – 367

Kedudukan *force majeure* dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum Islam kedudukan *force majeure* didasarkan kepada sesuatu hal yang dapat mengancam *maqasid al- syariah* seperti yang telah diuraikan berdasarkan pengertian *force majeure* dalam Hukum Islam. Batasan *force majeure* menurut Hukum Islam dengan hukum perdata. Kaidah-kaidah Islam yang menggambarkan keadaan *force majeure* di antaranya *masaqat* (kesulitan) bisa menarik kemudahan.²⁵ Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi pelaku, yang dalam hal ini adalah seorang *mukallaf*, maka syariat meringankannya sehingga orang *mukallaf* tersebut bisa melaksanakannya tanpa merasa kesulitan. Seperti halnya kesulitan orang yang sakit untuk melaksanakan shalat dengan berdiri maka bisa dengan duduk, apabila tidak bisa duduk maka dengan cara berbaring.²⁶

Kaidah di atas ini menjadi sumber adanya keringanan dalam menjalankan tuntutan syariat diantaranya seperti keringanan yang diberikan karena keadaan terpaksa serta unsur kurang mampu dan kesukaran umum yang menjadi akibat terjadinya *force majeure*. Kaidah tersebut merupakan hasil modifikasi dari QS. Al Baqarah: 185, QS. Al Hajj: 78, QS. An Nisa: 28, QS. Al Baqarah: 286, yang seluruh ayatnya tersebut menunjukkan kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Ayat-ayat Al-qur'an tersebut menjelaskan mengenai keringanan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa,

²⁵ H. Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, Cetakan II, UIN Maliki Pers, Malang, 2013, hlm. 154

²⁶ *Ibid.*, hlm. 154

namun tetap berkewajiban untuk menggantinya sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Substansi dari ayat di atas adalah Allah tidak akan mempersulit hamba-Nya dalam beribadah. Selain kaidah tersebut, terdapat juga kaidah lain yang sama dengan kaidah di atas yakni kemudahan (bahaya) harus dihilangkan, hanya saja kaidah ini lebih kepada kewajiban menghilangkan madarat setelah madarat itu terjadi (upaya pengobatan).²⁷

Sementara itu, di dalam literatur *fiqh* klasik, terdapat sebuah ketentuan hukum yang hampir menyerupai *force majeure*. Ketentuan ini biasa disebut dengan *al-Jaihah*, yaitu suatu keadaan dimana telah terjadi akad salam antara petani buah dan pembeli. Keduanya sepakat bahwa jika buah-buahan tersebut telah siap panen, maka petani menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah diterima oleh petani. Ketika hanya nampak beberapa buah yang matang, namun terjadi suatu bencana di luar kekuasaan keduanya yang memaksa petani tidak dapat menyerahkan hasil panennya. Atau bisa disimpulkan *al jaihah* adalah bencana yang biasa berlaku pada buah-buahan, yang menyebabkan kerusakan dan kemusnahan padanya.²⁸ Sejatinya *al-jaihah* dalam penerapannya tidaklah terbatas pada akad salam, melainkan dapat di-*qiyas*-kan kepada beberapa akad, diantaranya *ijrah*, *ba'i murabahah*, *isthisna'* dan sebagainya.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai keadaan memaksa bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 155

²⁸ Zaharuddin Abd. Rahman, *Fiqh Kewangan Islam*, PTS Islamika, Malaysia, 2014, hlm. 597

untuk melaksanakan perestasinya. Kemudian dalam Pasal 41 dijelaskan mengenai syarat-syarat peristiwa yang termasuk keadaan memaksa yakni, peristiwa tersebut haruslah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, peristiwa tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhi prestasi, peristiwa terjadi di luar kesalahan si pihak yang harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi prestasi tersebut tidak beritikad buruk.

Pasal 42 menjelaskan mengenai risiko yakni, kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak disebut sebagai risiko. Kemudian dalam Pasal 43 dijelaskan lebih lanjut mengenai risiko tersebut, yakni kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar salah satu pihak dalam akad perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar salah satu pihak dalam akad perjanjian timbal balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan.

Melihat Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya tidak ada aturan yang secara tegas dan khusus menjelaskan mengenai *force majeure* dalam Fatwa Dewan Syariah MUI. Namun terdapat beberapa fatwa yang sedikit menyinggung dan berkaitan dengan *force majeure*. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* pada dasarnya menetapkan Fatwa Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dimana LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Tinjauan tentang Baitul Maal Wa Tamwil

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di

daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.²⁹

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI).³⁰ Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem pembiayaan syariah yang tidak memiliki bunga seperti halnya pada bank konvensional, serta kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar syariah dan selalu beritikad pada pedoman yang sudah dianjurkan. Pertumbuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sejak pertama kali diperkenalkan pada awal 2000-an hingga saat ini, terus mengalami peningkatan dan mencapai titik yang luar biasa. Selama ini pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi BMT berada pada dua kelembagaan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga keuangan mikro di Indonesia memilih untuk berbadan hukum koperasi.

²⁹Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria, thn 2012, hlm. 108.

³⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, thn 2010, hlm. 455.

Hanya beberapa saja yang memilih pengawasan dan pembinaan di bawah OJK.³¹

Koperasi Baitul maal wat-tamwil (Koperasi BMT), sebagai sebuah lembaga yang terbangun dari percampuran antara dua sistem hukum yang berbeda (yaitu hukum perdata barat dan hukum Islam), pada akhirnya muncul sebagai sebuah lembaga dengan karakteristiknya sendiri yang relatif berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Sebagai bagian dari upaya untuk membangun (dan mempertahankan) karakteristiknya tersebut, sejak awal Koperasi BMT berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek tertentu dalam kegiatannya. Salah satu aspek yang terbangun dari awal dan tetap dipertahankan hingga saat ini adalah persoalan keharusan untuk Koperasi Baitul Maal Wat-tamwil.³² BMT sendiri memiliki pandangan jaminan dalam KUHPerdata yaitu :

a. Jaminan menurut Hukum Positif

Jaminan muncul berkaitan dengan perjanjian kredit (utang piutang). Keberadaan jaminan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit, maka sifat jaminan adalah assesoir. Berdasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata, pengertian jaminan adalah segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan

³¹shairanews.com, “Menyongsong Perkembangan BMT di Indonesia”, <https://sharianews.com/posts/menyongsong-perkembangan-bmt-di-indonesia>, Diakses pada 17 Juni 2021.

³²Kelik Wardiono, “KOPERASI BAITUL MAAL wat-TAMWIL: Persyaratan Pemberian Jaminan sebagai Inovasi dalam Aktivitas Penyaluran Dana di Baitul maal wat-tamwil”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm. 296-297, t.d.

untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelangsungan modal serta untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Dalam hal orang yang berhutang tidak dapat melakukan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengambil kembali uang yang dipinjamkan kepada debitur, dengan menjual barang yang telah dijaminkan sehingga dengan demikian kreditur mendapat kepastian tentang pengembalian uang yang telah dipinjamkan kepada debitur. Selain itu juga, kreditur yang mempunyai jaminan, akan mempunyai kedudukan sebagai kreditur Konkuren yang harus didahulukan pembayaran hutangnya daripada kreditur lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1133 (1) dan 1134 (2) KUH Perdata.³³ Jaminan juga dapat dibagi dua :

1. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan pihak ke tiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Jaminan perorangan ini yang dikenal adalah Penanggungan hutang *Borgtocht* atau *guaranty* perjanjian penanggungan ini diatur dalam pasal 1820-1850 KUH perdata.
2. Jaminan Kebendaan Jaminan kebendaan adalah suatu perjanjian yang diadakan antara kreditur dan debitur atau kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur jaminan kebendaan ini dapat berupa hak tanggungan, Gadai dan fidusia.³⁴

³³ Eugenia Liliawati Muljono dan Amin Widjaja Tunggal, *Eksekusi Grose Akta Hipotik Oleh Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*

BMT juga dapat mengartikan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan menurut hukum perdata, BMT juga dapat memperlakukan Gadai dan Fidusia. Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPperdata Bab XX Buku II KUHPperdata Pasal 1150 sampai dengan Pas1160. Menurut Pasal 1150 KUHPperdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. Sedangkan jaminan Fidusia menurut pasal 1 (1) Undang-Undang no. 42 tahun 1999, Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia. maka dalam fidusia harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya perjanjian pengalihan kepemilikan suatu benda dari debitur kepada kreditur. (2) Pengalihan tersebut berdasarkan kepercayaan. (3) Yang menjadi obyek jaminan Fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud atau yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, baik yang berwujud atau yang tidak berwujud. (4) Objek jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan debitur.³⁵

³⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 416.

b. Jaminan Menurut Hukum Islam

Jaminan Menurut Hukum Islam Jaminan, dalam hukum Islam, adanya berkaitan dengan bentuk muammalah yang dilakukan secara tidak tunai, seperti utang piutang uang ataupun dalam bentuk yang lainnya. Jaminan ini didasarkan pada ketentuan dalam surat Al-baqarah ayat 283. Dalam hukum Islam jaminan, dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan ini biasa disebut dengan Rahn (gadai) dan jaminan perorangan disebut dengan Kafalah (penanggungan hutang). Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Gadai

Gadai dalam istilah bahasa arab dinamakan dengan ar-rahn atau AlHabsu. Rahn yang berarti tetap atau lestari, dan Habsu berarti menahan.³⁶ Menurut Sayid Sabiq, pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut, menjadikan barang yang menjadi nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang (penggadai) disebut Rahin, Orang yang menerima gadai disebut Murtahin dan obyek yang digadaikan disebut *rahn*.³⁷ Kemudian bila orang yang berhutang, setelah lewat waktu gadai yang diperjanjikan belum mengembalikan hutangnya, maka barang tersebut dapat dijual dengan seizin penggadai, jika hal tersebut tidak tercapai, maka pemegang gadai

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Sughrowardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 90.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung: PT. Al-Maarif, 2000, hlm.139.

boleh meminta pertolongan hakim untuk memaksa ataupun memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjualnya. Hasilnya untuk melunasi hutang, selebihnya dikembalikan kepada penggadai, dan kekurangannya tetap menjadi kewajiban orang yang menggadaikan untuk melunasinya.

2. Kaffalah (Penanggung hutang)

Penanggungan hutang, menurut syariat Islam diistilahkan dengan Kafalah. Menurut ketentuan syara', kafalah ini diartikan sebagai proses penggabungan kafil menjadi tanggungan ahli dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang, atau barang, atau pekerjaan. Sebagai landasan hukum, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang kafalah dan menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/ IV/2000 tentang kafalah yang ditetapkan tanggal 08 Muharram 1421 H atau tanggal 13 April 2000. Fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa kafalah dilakukan dengan prosedur masing-masing bank syariah yang memberikan, dengan mengacu pada ketentuan umum bank garansi yang telah ditetapkan Bank Indonesia dan rukun kafalah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Peranan kafalah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan hubungan muamalah sesama umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya yang di dalamnya terkandung unsur tolong menolong. Memberikan penjaminan merupakan salah satu bentuk tolong

menolong. Kafalah berfungsi untuk memperlancar transaksi atau kerja sama bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu transaksi maupun kerja sama yang bernilai besar dan mengandung risiko. Selain itu peranan kafalah adalah untuk meningkatkan produktivitas perbankan dan produktivitas pengusaha.³⁸

Pengertian BMT diatas menegaskan bahwa BMT mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul Tamwil mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil-menengah dengan mendorong kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil-menengah. Sementara baitul maal menghimpun titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Terkait mengenai bentuk badan hukum bagi BMT, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Namun demikian para praktisi hukum dan BMT berpendapat telah ada landasan hukum yang menentukan koperasi sebagai bentuk badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negara Reuplik Indonesia Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bamngda), tanggal 14 april 1997 Nomor 538/pkk/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syari'ah. Kejelasan tentang bentuk badan hukum suatu lembaga di anggap penting karena berkaitan dengan pengakuan kualitas dan identitas menurut hukum positif di dalam suatu negara.

³⁸ KajianPustaka.com, *kafalah(pengertian,Landasan Hukum,jenis,bentuk dan mekanisme)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/kafalah-pengertian-landasan-hukum-jenis.html>, Diakses pada 17 Juni 2021.

Lembaga keuangan dalam arti luas sebagai perantara dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (Surplus of fund) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of fund) sehingga peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan masyarakat. Dan pengertian yang luas ini, maka lembaga keuangan dengan sendirinya mempunyai perbedaan, fungsi, dan kelebagaannya. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koprasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.³⁹

2. Kedudukan Baitul Maal Wa Tamwil dalam Peraturan Perundangan-Undangan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT sesungguhnya sudah cukup jelas, yakni BMT sebagai LKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hanyasaja, dalam prakteknya, BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan berdasarkan berdasarkan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan

³⁹Serbamakalah, *Ruang lingkup BMT*, <https://serba-makalah.com/ruang-lingkup-bmt/>, Di akses pada 17 Juni 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang ada adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Perkoperasian.

Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan perizinan dan pengawasan penyedia jasa keuangan, termasuk BMT. Adapun pembagian kewenangan tersebut di atas dapat diperiksa dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Usaha	Bentuk Badan Hukum	Izin Usaha	Syarat Modal Usaha	Pengawasan
Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 29 tahun 1999)	Perseroan Terbatas (PT) Koperasi (Jenis Koperasi Jasa Keuangan/KJK)	Otoritas Jasa Keuangan	Bank Umum Rp.3 Trilyun BPR: Kecamatan Rp4 milyar Kabupaten Rp.6 milyar Provinsi Rp.8 milyar Jakarta Rp.14 Miliar	Otoritas Jasa Keuangan
Simpan Pinjam (UU Nomor 25 Tahun 1992/PP Nomor 9 Tahun 1995)	Koperasi (Jenis Koperasi Simpan Pinjam, atau Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam), termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, serta Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Primer Rp15 juta Sekunder Rp.50 Juta	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Jenis Usaha	Bentuk Badan Hukum	Izin Usaha	Syarat Modal Usaha	Pengawasan
Lembaga Keuangan Mikro (UU Nomor 1 Tahun 2013/PP Nomor 89 Tahun 2014)	Perseroan Terbatas/PT Koperasi (Jenis Koperasi Jasa LKM)	Otoritas Jasa Keuangan	Tingkat Desa Rp50 Juta; Tingkat Kecamatan Rp100 juta Tingkat Kabupaten Rp.500 juta	Otoritas Jasa Keuangan
Leasing, Anjak Piutang, Asuransi, Ventura, dan Multifinance	Perseroan Terbatas/PT Koperasi (Jenis Jasa)	Otoritas Jasa Keuangan	Sewa Rp.10 milyar; Anjak Piutang Rp10 milyar Asuransi Rp.100 milyar Ventura Rp.10 milyar Multifinance Rp.200 milyar	Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 1
Pembagian kewenangan antara OJK dengan Kementerian Koperasi dan UKM.⁴⁰

Dari sini, dapat kita lihat bahwa BMT sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia terpecah menjadi dua lembaga Negara, yakni:

- BMT sebagai LKM, menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;
- BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut:

- BMT sebagai LKM, menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM).

⁴⁰Gemi, *Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt): Lembaga Keuangan Mikro Atau Koperasi?*, <https://www.gemi.co.id/2015/10/22/baitul-maal-wat-tamwil-bmt-lembaga-keuangan-mikro-atau-koperasi/>, Diakses pada tanggal 2 Juli 2021.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 yang dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui kredit atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dinyatakan bahwa Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Di sisi lain, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terdapat ketentuan bahwa Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang terbatas atau koperasi, maka penyesuaian terhadap badan yang dimaksud dilakukan

baik terhadap yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau kedua-duanya.

Ketentuan-ketentuan di atas masih ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
2. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
3. Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memohon sebagai Lembaga Keuangan Mikro/LKM, yang wajib memperoleh dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa

Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 ini ada kriminalisasi terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjalankan usaha BMT tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BMT sebagai LKM adalah kewajiban BMT untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaan pelaksanaannya. BMT, baik yang telah berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum harus menyesuaikan bentuk kelembagaan, sistem operasional, bidang usaha, permodalan, dan seluruh aspek yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas terkait Lembaga Keuangan Mikro.

- b. BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (bersumber dari praktek pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam praktek, ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selain Undang-Undang LKM yang pada saat ini juga mengatur BMT, BMT yang berbadan hukum Koperasi dan memiliki izin usaha simpan

pinjam. Pada saat ini, BMT tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf Q, mengatur:

1. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk mempersembahkan status badan hukum Koperasi;
2. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerbitkan izin usaha simpan pinjam, izin pendirian kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
3. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, termasuk Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam;
4. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
5. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan

6. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

Dalam praktek, BMT dapat memilih, apakah menjadi LKM menurut Undang-Undang LKM atau Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Yang ada dalam Undang-Undang LKM, prakteknya hanya ditujukan untuk menanggulangi penyelenggaraan LKM tanpa izin sama sekali, dan tidak berlaku bagi BMT yang menjadi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi Syariah.⁴¹

D. Tinjauan Umum tentang Covid-19

1. Pengertian tentang Covid-19 dalam World Health Organization (WHO)

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia) yang cenderung lebih rentan menyebabkan kematian pada kelompok usia 45-59 tahun atau orang dengan penyakit tertentu. Penyebaran wabah Covid-19 sejak November 2019 di Wuhan, China terus mengalami eskalasi yang signifikan dan berkelanjutan secara global. Pernyataan wabah

⁴¹ Gemi, *Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt): Lembaga Keuangan Mikro Atau Koperasi?*, <https://www.gemi.co.id/2015/10/22/baitul-maal-wat-tamwil-bmt-lembaga-keuangan-mikro-atau-koperasi/>, Diakses pada tanggal 2 Juli 2021.

Covid-19 sebagai suatu pandemi global oleh World Health Organization (WHO) sudah mengakibatkan beragam permasalahan baru di sejumlah sektor di Indonesia, bahkan dunia.¹ Tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyebabkan krisis multidimensi.⁴²

Covid-19 dideklarasikan sebagai pandemik oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Hal ini membuat Covid-19 menjadi perhatian utama dunia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap agen penyebab Covid-19 serta patogenesis dan manifestasi klinis pada pasien Covid-19. Mengingat kembali bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of Inter-national Concern (PHEIC), ini meandakan COVID-19 sebagai ancaman global dunia. Namun belum ada obat terapeutik khusus untuk penyakit menular ini. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang SARS-CoV-2 sangatlah penting untuk mengeksplorasi obat yang kemungkina yang lebih efektif. Dalam ulasan ini, merangkum kemajuan pengembangan terapi SARS-CoV-2 untuk menyediakan kerangka kerja terhadap COVID-19.⁴³

WHO telah menyatakan bahwa virus ini tidak ada obatnya dalam penanganan khusus baik pihak pemerintah maupun rumah sakit, hal tentu membuat seluruh dunia tercengang dengan adanya virus yang berasal dari Asia yaitu kota wuhan cina. WHO menyebutkan virus ini sangat cepat dalam penularannya hingga sampai pada benua Amerika dan benua Eropa

⁴²Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, Supremasi Hukum, Vol.9 No.1, Juni 2020.

⁴³Armanto Makmun dan Nur Siamau Ramadani, *“Tinjauan Terkait terapi Covid-19”*, Skripsi Sarjana Kedokteran, Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, 2020, hlm.1.

hingga akhirnya semua negara menegakan peraturan baru tentang mencegah virus ini kepada masyarakat. Virus ini sebenarnya hanya bisa berimplikasi pada hewan saja tetapi entah kenapa hingga sampai manusia bahkan menyuluruh hingga belahan dunia.

2. Tinjauan awal masuknya virus Covid-19 di Indonesia

Wuhan adalah kota terbesar ketujuh di Tiongkok, dengan populasi lebih dari 11 juta orang. Kota ini merupakan pusat transportasi utama di Tiongkok bagian tengah, yang terletak sekitar 700 mil (1100 km) di sebelah selatan Beijing, 500 mil (800 km) di sebelah barat Shanghai, dan 600 mil (970 km) di sebelah utara Hong Kong. Bandar udara Wuhan memiliki penerbangan langsung ke berbagai kota besar di Eropa: enam kali penerbangan mingguan ke Paris, tiga kali ke London, dan lima kali ke Roma. Tidak dapat disangkal bahwa covid-19 merupakan sebuah virus yang sangat berbahaya dan tidak dapat diperkirakan di awal jika virus tersebut akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Namun, hal ini juga tak serta-merta segala sesuatu kegiatan dihentikan karena virus covid-19. Pada awal 2020 Indonesia kemasukan para wisata asing yang berasal dari cina, awalnya masyarakat menilai virus ini tidak terlalu mematikan atau tidak menular cepat. Ibu kota Jakartalah di bandara Soekarno Hatta awal terjadinya masuk virus ini hingga melebar luas ke seluruh Indonesia. Presiden Jokowianggapi serius tentang virus ini hingga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres No 11 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam kedaruratan kesehatan masyarakat

Disease. Hal ini tentu sangat darurat hingga akhirnya seluruh kegiatan masyarakat dihentikan bahkan tidak jelas kapan selesai.

Pemberhentian ini tentu sangat menjadi pertimbangan bagi pemerintah menegaskan kebijakan-kebijakan peraturan yang saat ini harus bisa membuat kondisi normal kembali. Covid-19 tentu melemahkan pada sektor Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi nasional. Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) yang di dukung oleh Satgas Pengawasan Covid-19. Dalam menjalankan semua perturan-peraturan yang ada diharapkan semuanya tau bahwa Covid-19 virus yang tidak terlihat bahkan saat ini Indonesia sedang dijajah oleh virus yang tidak terlihat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Force Majeure* dalam masa kondisi pandemi Covid-19.

1. Kedudukan *Force Majeure* dalam Akad Murabahah

Force majeure adalah suatu keadaan yang memaksa yang dialami manusia, suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Hukum Islam *force majeure* dapat dipersamakan dengan istilah *dharurah*. Dalam Hukum Islam *dharurah* diambil dari kata *darra*, *yadurru* dan *darran* yang memiliki arti merusak atau memberi *mudharat*. *Dharurah* adalah keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam Hukum Islam yang dikenal sebagai *maqasid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *dharurah* tersebut.⁴⁴

Setiap permohonan pembiayaan *murabahah* BMT akan menerangkan esensi dari pembiayaan *murabahah* serta kondisi penerapannya. Salah satu yang diterangkan adalah tentang definisi atas kondisi *force majeure* yang

⁴⁴ Ridho Rokamah, “*Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*”, Ponorogo:Stain Press, 2010, hlm. 52.

dapat dijadikan dasar acuan bahwa BMT tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik.⁴⁵ Kedudukan *force majeure* dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum Islam kedudukan *force majeure* didasarkan kepada sesuatu hal yang dapat mengancam *maqasid al- syariah* seperti yang telah diuraikan berdasarkan pengertian *force majeure* dalam Hukum Islam. Batasan *force majeure* menurut Hukum Islam dengan hukum perdata.

Kaidah-kaidah Islam yang menggambarkan keadaan *force majeure* di antaranya *masaqat* (kesulitan) bisa menarik kemudahan.⁴⁶ Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi pelaku, yang dalam hal ini adalah seorang *mukallaf*, maka syariat meringankannya sehingga orang *mukallaf* tersebut bisa melaksanakannya tanpa merasa kesulitan. Seperti halnya kesulitan orang yang sakit untuk melaksanakan shalat dengan berdiri maka bisa dengan duduk, apabila tidak bisa duduk maka berbaring.⁴⁷ Melihat Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya tidak ada aturan yang secara tegas dan khusus menjelaskan mengenai *force majeure* dalam Fatwa Dewan Syariah MUI. Namun terdapat beberapa fatwa yang sedikit menyinggung dan berkaitan dengan *force majeure*. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* pada dasarnya menetapkan

⁴⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 238

⁴⁶ H. Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, Cetakan II, UIN Maliki Pers, Malang, 2013, hlm. 154

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 154

Fatwa Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dimana LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran pada intinya menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa

denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak. terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa MUI tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Perihal terjadinya *force majeure* dalam akad murabahah ialah beragam. Menurut pembagiannya, *force majeure* sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :⁴⁸

1) Menurut Jenisnya

a) *Force majeure* objektif

Force majeure ini terjadi pada benda yang merupakan objek dari kontrak sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur.

b) *Force majeure* subjektif

Force majeure ini berhubungan dengan keadaan atau kemampuan dari debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan prestasi.

⁴⁸ OJK, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf> pada tanggal 02 Juli 2021

2) Menurut Pelaksanaannya

a) *Force majeure* absolut

Suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dikarenakan bencana alam atau *act of God* yang bersifat mutlak, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar dan lain-lain.

b) *Force majeure* relatif

Dalam *force majeure* ini, pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, walaupun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. *Force majeure* ini disebut juga *act of nature* yang dapat disimpulkan peristiwa ini tidak bersifat mutlak atau relatif.

3) Menurut Jangka Waktu Berlakunya

a) *Force majeure* permanen

Yakni efek terjadinya *force majeure* sampai kapanpun kontrak tidak akan mungkin dilakukan lagi untuk memenuhi suatu prestasi kontrak yang telah dijanjikan. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan salah satu pihak.

b) *Force majeure* temporer

Dimana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Atau dengan kata lain, karena terjadi peristiwa tertentu dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.

2. Kedudukan *Force Majeure* dalam Akad Perdata

Berkaitan dengan ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut.⁴⁹ *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*. Hal ini berbeda dengan ketentuan *force majeure* yang diatur di dalam KUHPerdata maupun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pengaturan tentang *force majeure* di dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Pasal 1244 berbunyi “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.” Dan pasal 1245 berbunyi “Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk

⁴⁹ Anonim, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Houston: Jones Day Publication, 2011, hlm. 1.

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Menurut V. Brakel, dengan adanya *overmacht/ force majeure*, menyebabkan kewajiban prestasi debitur menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjut adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa.⁵⁰ Sedangkan menurut KHES, yakni pada pasal 43 ayat 1, yang rumusannya sebagai berikut, “kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh peminjam”, kemudian ayat selanjutnya, “kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan”.⁵¹

Berdasarkan hal di atas, keberadaan sarana dan mekanisme penanganan terhadap pembiayaan bermasalah merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh nasabah sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah, serta sebagai upaya untuk menghindari konflik lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank. Menurut Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, yang diterbitkan oleh OJK, penyelesaian sengketa pada kasus pembiayaan muarabahah bermasalah memiliki beberapa tahapan, yaitu:⁵²

⁵⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 249

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 43 ayat (1 dan 2).

⁵² OJK, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, *Op.Cit*

- a. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak Bank dengan nasabah harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat;
- b. Mekanisme musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi yang dianggap sesuai dengan kemampuan dan kondisi nasabah yang terkena *force majeure*;
- c. Beberapa solusi yang ditawarkan bank dalam mekanisme musyawarah kepada nasabah seperti perpanjangan waktu pembayaran angsuran, perubahan jumlah angsuran, pemberian tambahan kredit, dsb;
- d. Apabila mekanisme musyawarah belum berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan eksekusi atau putusan arbitrase syariah itu akan ditetapkan melalui Pengadilan Agama;
- e. Apabila para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, maka Bank dan Nasabah harus menyepakati dalam kontrak bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama;
- f. Pihak Bank tidak diperkenankan menuliskan klausula dalam kontrak yang membolehkan Bank melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi tanpa putusan pengadilan;
- g. Pihak Bank tidak diperkenankan melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa

Nasabah lalai dan memberikan hak kepada Bank untuk eksekusi agunan dan jaminan;

- h. Jika sampai tahap eksekusi agunan obyek pembiayaan dan/atau jaminan lainnya dilakukan, maka hasil eksekusi (penjualan/pelelangan) tersebut diutamakan untuk memenuhi kewajiban Nasabah kepada Bank. Jika ada kelebihan nilai eksekusi maka dikembalikan ke Nasabah, jika masih kurang untuk memenuhi hak Bank maka hal itu tetap menjadi kewajiban Nasabah hingga Bank menghapuskan kewajiban tersebut. Berakhirnya akad *murabahah* dapat disebabkan oleh berakhirnya jangka waktu akad, peristiwa *force majeure*, cedera janji, dan nasabah yang mengajukan pengakhiran akad *murabahah*. Dalam pengakhiran akad *murabahah*, perihal *force majeure* yang menyatakan jika objek pada perjanjian akad *murabahah* hilang atau musnah dikarenakan *force majeure* dan tidak ada itikad buruk padanya maka perjanjian akad *murabahah* diantara para pihak dapat saja berakhir.

Keadaan memaksa (*Force Majeure*) bisa dijadikan untuk membuktikan perjanjian suatu bisnis atau suatu kredit di lembaga keuangan mikro, dengan ini mengajukan pembelaan pihak yang sedang tidak bisa menjalankan suatu kewajibannya. Maka dari itu *force majeure* tidak selalu memfokuskan pada suatu bencana alam, kudeta, dan perang. Di awal 2019 Covid-19 datang ke Indonesia dengan melumpuhkan semua sektor bidang yang ada Indonesia. Salah satunya adalah sektor yang sangat diperhatikan pemerintah yaitu sektor ekonomi. Dihubungkan dengan adanya kondisi pandemi Covid-19

bukanlah kehendak semua orang maupun pemerintah, pemerintah telah menjadikan bahwa Covid-19 sebagai virus yang membahayakan jika manusia itu tertular dan dapat mengakibatkan kematian oleh karenanya menyampaikan beberapa anjuran maupun ketentuan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Jika keadaan pandemik Covid-19 akan dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa (*force majeure*) maka suatu kebijakan atau ketentuan keringanan angsuran dengan tempo yang sudah saling di sepakati oleh lembaga pembiayaan yang diberikan pada pelaku peminjam sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

B. Penerapan *Force Majeure* terhadap Perjanjian Kredit di Kantor BMT

Amanah Barokah Slawi

Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum koperasi salah satunya pada Kantor BMT Amanah Barokah Slawi yaitu penulis meneliti dengan kejadian Akad pada kantor tersebut, yang mana BMT Amanah Barokah Slawi menjalankan tugasnya dalam bentuk simpan pinjam. Simpanan tabungan, simpanan haji atau umroh, dan simpanan tabungan berjangka dengan sistem syariat islam yang dianutnya, pada BMT tidak ada potongan bunga seperti halnya bank konvensional, tetapi BMT Amanah Barokah Slawi melakukan sistem bagi hasil. BMT Amanah Barokah Slawi juga menawarkan pinjam dana kredit pada barang atau kendaraan, penulis memahami sistem cara pinjam dana dengan cara kredit di BMT Amanah Barokah Slawi yaitu dengan cara membarangkan uang ketika ingin dipinjamkan pada pelaku akad tersebut. Contoh ketika pelaku kreditur meminjam dana tidak berupa uang melainkan

membelikan barang pada anggota yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan dibelikan barangnya maka pelaku baru dapat menerima berupa uang dari UMKM dengan atas nama BMT Amanah Barokah Slawi itu dilakukan karena agar terhindar dari adanya riba. BMT Amanah Barokah Slawi sendiri terbentuk swadaya dan berbadan hukum pada koperasi, sehingga menimbulkan prinsip dari anggota untuk anggota.⁵³

Dalam hal ini penulis mengamati pada penerapan *force majeure* pada kantor BMT Amanah Barokah Slawi sering terjadi, tak bisa dihindari pada pelaku LKM, Perbankan, atau Lembaga Pembiayaan sejenisnya. Untuk menyelesaikannya sering dilihat dengan keadaan kahar dan di ikuti prinsip syariah agar debitur terhindar dari riba yang biasanya terjadi pada perbankan. Contoh kasus kegiatan *force majeure* yang pernah terjadi di kantor BMT Amanah Barokah Slawi yakni perjanjian kreditur dengan kantor BMT Amanah Barokah Slawi. Awalnya kreditur membeli barang pada suatu toko dan di akad oleh kantor BMT Amanah Barokah Slawi untuk menyelesaikan suatu kewajiban perjanjian dalam melunasi tersebut. Selanjutnya penulis akan membahas masalah perjanjian antara kreditur dan kantor BMT Amanah Barokah Slawi yang berupa barang senilai Rp. 10.000.000 dan di angsur selama 10 bulan waktu temponya, berhubung kantor BMT Amanah Barokah Slawi bukan perbankan melainkan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi dan berprinsip syariah maka tak ada suatu bunga dalam perjanjian

⁵³Wawancara dengan Azis Sujatmiko, Manager Kantor BMT Amanah Barokah Slawi, tanggal 23 Juni 2021 jam 09.00.

melainkan bagi hasil (*murabahah*).⁵⁴ Pada 21 Februari 2020 kreditur mengalami keadaan diluar dugaan dengan tidak bisa menyelesaikan suatu akad dikarenakan adanya non-bencana alam dan sudah satu tahun covid-19 meresahkan di Indonesia. Oleh karena itu debitur dapat dilindungi prestasinya dalam melakukan suatu perjanjian dengan *force majeure* yang dapat ditunda angsuran dalam pembayaran tersebut.

Terbentuknya BMT Amanah Barokah Slawi berbentuk hukum pada dinas koperasi, maka tentu berbeda dengan perbankan-perbankan konvensional hal ini BMT sudah di atur pada Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Untuk syarat menderikan suatu koperasi dalam lembaga pembiayaan seperti BMT minimal memiliki anggota 20 orang agar bisa mewujudkan BMT tersebut, adanya BMT itu sendiri sangat membantu pada masyarakat. Sebagai suatu lembaga pembiayaan yaitu BMT memiliki ciri ganda yaitu suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial, sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas badan hukum Koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial didalamnya. Dengan adanya ciri ganda dalam diri BMT serta adanya kekuatan yang tidak terbatas yang terkumpul dalam Rapat Anggota, maka dalam manajemennya terdapat kesulitan-kesulitan yang tidak dijumpai sebagaimana pada organisasi ekonomi lainnya. Untuk saat lembaga dan LKM

⁵⁴ Wawancara dengan Azis Sujatmiko, Manager Kantor BMT Amanah Barokah Slawi, tanggal 23 Juni 2021 jam 09.00.

sejenisnya memang sangat dibutuhkan pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang beragama islam yang dianutnya.⁵⁵

Literatur yang membahas tentang BMT tergolong sangat sedikit. Diketahui bahwa lembaga ini muncul sebagai konsep lembaga keuangan syariah di Indonesia, di luar sistem perbankan. Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT. Mengingat dari BMT Amanah Barokah Slawi adalah Lembaga Keuangan Mikro yang diatur pada Undang-undang no 1 tahun 2013, BMT Amanah Barokah Slawi juga mengalami macet dari suatu masalah perjanjian yang telah dibuat dari 2 pihak, salah satunya ketika pelaku melakukan kegiatan kredit pada kantor BMT Amanah Barokah Slawi. Hampir sama seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya istilah untuk penerapan keadaan memaksa (*force majeure*) diberlakukan dengan menimbang keadaan pelaku kreditur melakukan wanprestasi pada BMT Amanah Barokah Slawi, karena BMT Amanah Barokah Slawi sifatnya tidak memaksa tetapi pelaku juga harus melakukan kewajibannya.⁵⁶ *Force Majeure* atau keadaan memaksa dapat menuai perhatian serius dari kedua pihak pelaku perjanjian dalam suatu kredit karena dalam lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT Amanah Barokah Slawi memiliki peraturan ketika pelaku terkena *force majeure* yaitu:

1. Menyelesaikan secara kekeluargaan dengan hal ini pelaku kreditur akan merasa tersadarkan ketika untuk melakukan suatu kegiatan akad.

⁵⁵ Wawancara dengan Azis Sujatmiko, Manager Kantor BMT Amanah Barokah Slawi, tanggal 23 Juni 2021 jam 09.00.

⁵⁶ Wawancara dengan Azis Sujatmiko, Manager Kantor BMT Amanah Barokah Slawi, tanggal 23 Juni 2021 jam 09.00.

2. Menyelesaikan dengan jangka tempo yang cukup panjang waktunya awal peminjaman batas harus yang dibayar 1 minggu sebelum jatuh tempo berikutnya, hambatan pelunasan pada suatu kredit sah-sah saja jika kreditur terkena alasan *force majeure* pada Kantor BMT Amanah Barokah Slawi.
3. Menyelesaikan dengan kaidah-kaidah syariah islam yang selalu menasehati para pelaku kreditur agar selesai menjalankan akad.
4. Menyelesaikan dengan menimbang adanya hukum pasar yang berlaku, yaitu tentang alasan keadaan memaksa. *Force Majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum.⁵⁷

Bukan hambatan yang dibuat secara sengaja atau oleh karena kelalaian, hambatan karena kelalaian merupakan kejadian yang disebabkan oleh tindakan diri pribadi debitur atau adanya *vreemde oorzaak* (sebab luar). Dalam wawancara ini penulis memahami bahwa pelaksanaan akad suatu perjanjian itu dapat di selesaikan tidak harus pada waktu yang sudah di tentukan, apabila dalam kondisi pandemik covid-19 yang terus berlanjut akan timbul rasa kekhawatiran dan menyebabkan suatu terjadinya kepailitan, akan tetapi pelaksanaan akad tidak harus untuk dijadikan suatu alasan keadaan memaksa atau *force majeure* karena suatu akad terjadi karena awal suatu perjanjian. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut, alasan ini bisa bertentangan dengan perbuatan melawan hukum perikatan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan

⁵⁷ Wawancara dengan Azis Sujatmiko, Manager Kantor BMT Amanah Barokah Slawi, tanggal 23 Juni 2021 jam 09.00.

dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan berlakunya *Force Majuere* sangat membantu karena untuk melindungi para debitur yang terkena hambatan untuk melakukan kewajiban.
2. Kondisi pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dari kegiatan perkreditan pada suatu alasan yang kuat dalam menghambat kegiatan kredit di suatu lembaga pembiayaan. BMT Amanah Barokah Slawi berjalan dengan koperasi secara syariat islam dan di bentuk untuk menolong masyarakat islam agar terhindar dari riba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagi Kementrian Koperasi dan UKM

Kementrian Koperasi dan UKM untuk bersikap tegas atas segala pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perkoperasian yang terjadi. Untuk lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap BMT yang telah berkonversi menjadi Koperasi.

2. Bagi Pemerintah

Untuk lebih mendorong BMT yang telah berbadan hukum Koperasi agar mematuhi peraturan-peraturan terkait perkoperasian agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap fungsi-fungsi Koperasi.

Untuk bersikap tegas atas pilihan untuk berbadan hukum Koperasi dengan cara tunduk sepenuhnya pada prinsip-prinsip perkoperasian.

Agar lebih berusaha meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan serta usahanya agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk menyempurnakan bentuknya menjadi KJKS apabila kegiatan usahanya berupa pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah.

3. Bagi Anggota BMT Amanah Barokah Slawi

Agar selalu mengerti dan selalu berhati-hati dalam kegiatan akad yang pada dasarnya BMT Amanah Barokah Slawi LKM yang bernilai syariat islam yang sudah dianutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Bogor *Formalisasi syariat islam dalam Prespektif Tata Hukum di Indonesia*, , 2006.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT RajaGrafindo Persada.Jakarta,2008
- Amirudin dan zainal asyikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: rajawali Pers, 2010
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, thn 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011
- Chairuman Pasaribu dan Sughrowardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,1996
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Eugenia Liliawati Muljono dan Amin Widjaja Tunggal, *Eksekusi Grose Akta Hipotik Oleh Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- H. Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Cetakan II, UIN Maliki Pers, Malang, 2013
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Reality Publisher*, Surabaya: Graha, 2009.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Buku Kesatu, 2003
- Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Stain Press, Ponorogo, 2010
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung: PT. Al-Maarif, 2000
- Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 1986.
- Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria, thn 2012
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Susanto, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Jakarta, Alfabeta, 2003.
- P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Zaharuddin Abd. Rahman, *Fiqh Kewangan Islam*, PTS Islamika, Malaysia, 2014.

B. Jurnal

- Achi Hartoyo, BWM, BMT, dan BPRS, Apa Bedanya?, <https://www.sharianews.com/posts/bwm-bmt-dan-bprs-apa-bedanya>, Diakses 16 febuari 2021.
- Armanto Makmun dan Nur Siamau Ramadani, “*Tinjauan Terkait terapi Covid-19*”, Skripsi Sarjana Kedokteran, Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, 2020.
- Arie Exchell Prayogo Dewangker, Penggunaan Klausula *Force Majuere* dalam Kondisi Pandemi, Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1959>
- Asep Ganjar Sukarelawan, Retno Anisa Larasati, Sistem Operasional Internal Bank Syariah, Inal Kahfi, *Al-Mujadid: jurnal Ilmu-ilmu Agama* 2 (1), 60-70, 2020, https://scholar.google.co.id/citations?user=NH82kGgAAAAJ&hl=en#d=gs_md_citad&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl

[%3Den%26user%3DNH82kGgAAAAJ%26citation_for_view%3DNH82kGgAAAAJ%3ATyk-4Ss8FVUC%26tzm%3D-420](#)

Ashofatul Lailiyah, “*Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Bank untuk Meminimalisir Resiko*”, *Yuridika*, Vol. 29 No. 2 Mei-Agustus 2014.

Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (force majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, jurnal *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam 2 (1), 222-243, 2015.

Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.

Kelik Wardiono, “KOPERASI BAITUL MAAL wat-TAMWIL: Persyaratan Pemberian Jaminan sebagai Inovasi dalam Aktivitas Penyaluran Dana di Baitul maal wat-tamwil”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, t.d

Melihat Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI), tentang Murabahah poin keempat dan kelima, Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/Vol.IV/2000.

Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 20 Febuari 2021.

Solihin, S. Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maalwat Tamwil) di Masa Pandemi COVID-19 *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* , 19 (1) 2020, 131-142.

Suhaeri, “Putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 10 No. 2 Juni 2013.

Umdah Aulia Rohmah, *Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal *Lex Reanis Ssance*, No. 1 Volume. 4 Januari 2019.

Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, *Supremasi Hukum*, Vol.9 No.1, Juni 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.05/2014.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

D. Website/Artikel

Abdul Rasyid, *Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>, Diakses pada 17 Februari 2021.

Achi Hartoyo, *BWM, BMT, dan BPRS, Apa Bedanya?*, <https://www.sharianews.com/posts/bwm-bmt-dan-bprs-apa-bedanya>, Diakses 16 Februari 2021.

Christian Josua F.X, *Mengenal Istilah "Force majeure"*, <https://www.kompasiana.com/christianjosua/5e7c6e5ad541df079d130974/mengenal-istilah-force-majeure>, Diakses 16 Juni 2021

Gemi, *Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt): Lembaga Keuangan Mikro Atau Koperasi?*, <https://www.gemi.co.id/2015/10/22/baitul-maal-wat-tamwil>

HukumOnline.com, *Alasan Force Majeure yang Berimplikasi PHK Karyawan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e957e37d3ef0/alasan-force-majeur-yang-berimplikasi-phk-karyawan>, Diakses pada 16 Juni 2021

KajianPustaka.com, *kafalah(pengertian,Landasan Hukum,jenis,bentuk dan mekanisme)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/kafalah-pengertian-landasan-hukum-jenis.html>, Diakses pada 17 Juni 2021.

OJK, "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf> Diakses pada tanggal 02 Juli 2021

Rachmat SS Soemardipraja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat- syarat pengajuan perjanjian disebabkan keadaan paksa/Force Majeure*, <https://shallmanalfarizy.com/2020/05/pengertian-force-majeure-menurut-para-ahli/>, Diakses pada 16 Juni 2021

Satgas Waspada Investasi, “*OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi*”, <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi>, Diakses 17 Febuari 2021.

Serbamakalah, *Ruang lingkup BMT*, <https://serba-makalah.com/ruang-lingkup-bmt/>, Di akses pada 17 Juni 2021.

Shairanews.com, “*Menyongsong Perkembangan BMT di Indonesia*”, <https://sharianews.com/posts/menyongsong-perkembangan-bmt-di-indonesia>, Diakses pada 17 Juni 2021

Sovia Hasanah, S.H, *Arti Landasan Filosofis ,Sosiologis, dan Yuridis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/#:~:text=Unsur%20yuridis%20menggambarkan%20bahwa%20peraturan,hukum%20dan%20rasa%20keadilan%20masyarakat>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Prayoga Aldio De La Sanda
NPM : 5117500141
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 03 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Ujungrusi RT.18/RW.02 No. 35
Kec. Adiwerna Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan :

NO	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	TK.Kartika Ujungrusi	2003	2004
2.	SD Negeri 01 Ujungrusi	2004	2010
3.	SMP Negeri 1 Adiwerna	2010	2013
4.	SMA Negeri 1 Pangkah	2013	2016
5.	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 05 Agustus 2021

Hormat saya,

Prayoga Aldio De La
Sanda